

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Collaborative governance merupakan aspek penting dalam menangani kemiskinan di desa Sendangmulyo, karena di dalamnya melibatkan kolaborasi berbagai stakeholder. Kolaborasi pemerintahan melibatkan dalam mengidentifikasi hambatan, yang dapat dicapai melalui kolaborasi para pemangku kepentingan salah satunya untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan di desa sendangmulyo ini mengalami kemiskinan absolut dan kemiskinan yang relatif dimana pokok permasalahannya pada kesehatan dan pendidikan, serta proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Dalam proses ini melibatkan mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan dan menerapkan strategi untuk mencapainya. Dari kelima indikator dalam proses kolaborasi terdapat dua indikator yang dikatakan masih belum berjalan dengan sempurna diantaranya pada *share understanding* dan *intermediate outcomes* tidak menunjukkan penyesuaian untuk dipahami oleh masyarakat dimana lam penyesuaian pemahaman dalam memberikan feedback yang baik untuk respon dari proses kolaborasi pemerintahan melalui Program KPM PKH atau gelar budaya. Sedangkan untuk ketiga indikator seperti *face to face dialogue*, *trust building*, dan *commitment* to proses sudah berjalan dengan baik antara pemerintahan daerah, pamong kalurahan dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi pemerintahan melalui program KPM PKH atau gelar budaya dapat menjadikan masyarakat yang awalnya *menganggur* sekarang sudah lebih produktif dan mempunyai tambahan penghasilan untuk membantuk perekonomian dalam keluarganya. Secara keseluruhan proses kolaborasi pemerintahan dalam program KPM PKH atau gelar budaya dalam penanganan kemiskinan ini sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik karena sudah mampu membentuk lima kelompok UMKM diluar acara Gelar budaya yang dilakukan satu tahun sekali. Dalam pelaksanaan programnya masih ada beberapa permasalahan yang belum mampu dipecahkan oleh pihak kalurahan sendangmulyo karena belum sempurna dalam hal kepemimpinian fasilitas dan belum

ada aturan dasar yang cukup jelas untuk keberlangsungan programnya, serta pemahaman masyarakat terhadap adanya kolaborasi melalui program ini.

5.2 Saran

Dari peneliti mengusulkan supaya kolaborasi pemerintahan ini lebih di sempurnakan melalui program yang ada untuk dapat menangani kemiskinan di desa sendangmulyo, dengan berjalannya program kolaborasi dalam jangka waktu yang lama dan tidak hanya dilaksanakan hanya dalam satu tahun sekali. Dengan ditingkat kolaborasi melalui program ini dapat menangani kemiskinan di desa sendangmulyo lebih cepat teratasi. Serta lebih giat lagi dalam mensosialisasikan berjalannya kolaborasi pemerintahan melalui program KPM PKH atau gelar budaya untuk penanganan kemiskinan kepada semua masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam program ini. Selain itu pihak kalurahan supaya membuat aturan dasar pihak yang ikut dalam program ini dapat merasa mampu untuk memajukan usaha mereka di luar acara gelar budaya. Dalam kolaborasi ini perlu adanya pihak swasta yang berkolaborasi dengan pihak pemerintahan juga, tidak hanya di lakukan sepihak seperti sekarang yang hanya dilakukan antara woodeco indonesia dengan masyarakat tanpa adanya peran pemerintah di dalamnya. Hal ini menjadi acuan penting untuk membuat kolaborasi pemerintahan dalam program ini berjalan dengan baik dalam penanganan kemiskinan.